

ABSTRAK

Penyebaran video asusila disertai tindak pidana pemerasan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang timbul akibat dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Penyebaran video asusila disertai tindak pidana pemerasan merupakan salah satu tindak pidana yang termuat dalam pasal 14 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pasal 14 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Apa Kendala dalam penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis metode *socio legal reseach* atau lebih dikenal dengan penelitian empiris, melalui metode pendekatan sosiologis dan historis yang bersumber pada data primer, data sekunder, dan data tersier. Dari sumber data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Setelah data dikumpulkan data akan diolah dengan menggunakan metode *editing, organizing, dan analizing*. Data ini berisi tentang hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan Pasal 14 Ayat (1) huruf A Undang-undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di wilayah Polres Kediri Pare sudah berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini terbukti dengan berhasilnya pihak Polres Kediri Pare dalam menangkap pelaku penyebaran video asusila disertai tindak pidana pemerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Kediri. Adapun kendala yang dialami oleh pihak Polres Kediri Pare dalam menerapkan Pasal 14 Ayat (1) huruf A Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam kasus penyebaran video asusila disertai tindak pidana pemerasan terhadap anak

diantaranya terdiri dari faktor aparat penegak hukum, faktor perundang-undangnya, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum dari pelaku dan korban, serta faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Seksual

ABSTRACT

The dissemination of obscene videos accompanied by acts of extortion against children is a crime that arises from the development of technology and communication. The dissemination of obscene videos accompanied by acts of extortion is one of the crimes specified in Article 14 paragraph (1) letter A of Law Number 12 of 2022. The problem in this research is how the implementation of Article 14 paragraph (1) letter A of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and What are the obstacles in the implementation of Article 14 paragraph (1) letter A of Law Number 14 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. The research method used in this study is the socio-legal research method or better known as empirical research, through sociological and historical approaches based on primary data, secondary data, and tertiary data. Data from these sources are collected using data collection techniques such as interviews, documentary studies, and literature studies. After the data is collected, it will be processed using editing, organizing, and analyzing methods. This data contains research results showing that the implementation of Article 14 paragraph (1) letter A of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes in the Kediri Pare Police Resort area has been carried out in accordance with the applicable law, as evidenced by the success of the Kediri Pare Police in apprehending perpetrators of disseminating obscene videos accompanied by acts of extortion against children in Kediri Regency. The obstacles experienced by the Kediri Pare Police in implementing Article 14 paragraph (1) letter A of Law Number 12 of 2022 in cases of disseminating obscene videos accompanied by acts of extortion against children include factors related to law

enforcement agencies, legal factors, infrastructure factors, legal awareness of perpetrators and victims, and cultural factors.

Keywords: Crime, Violence, Sexual